# MONTHLY UPDATE ON RELIGIOUS ISSUES IN INDONESIA

JANUARI 2023

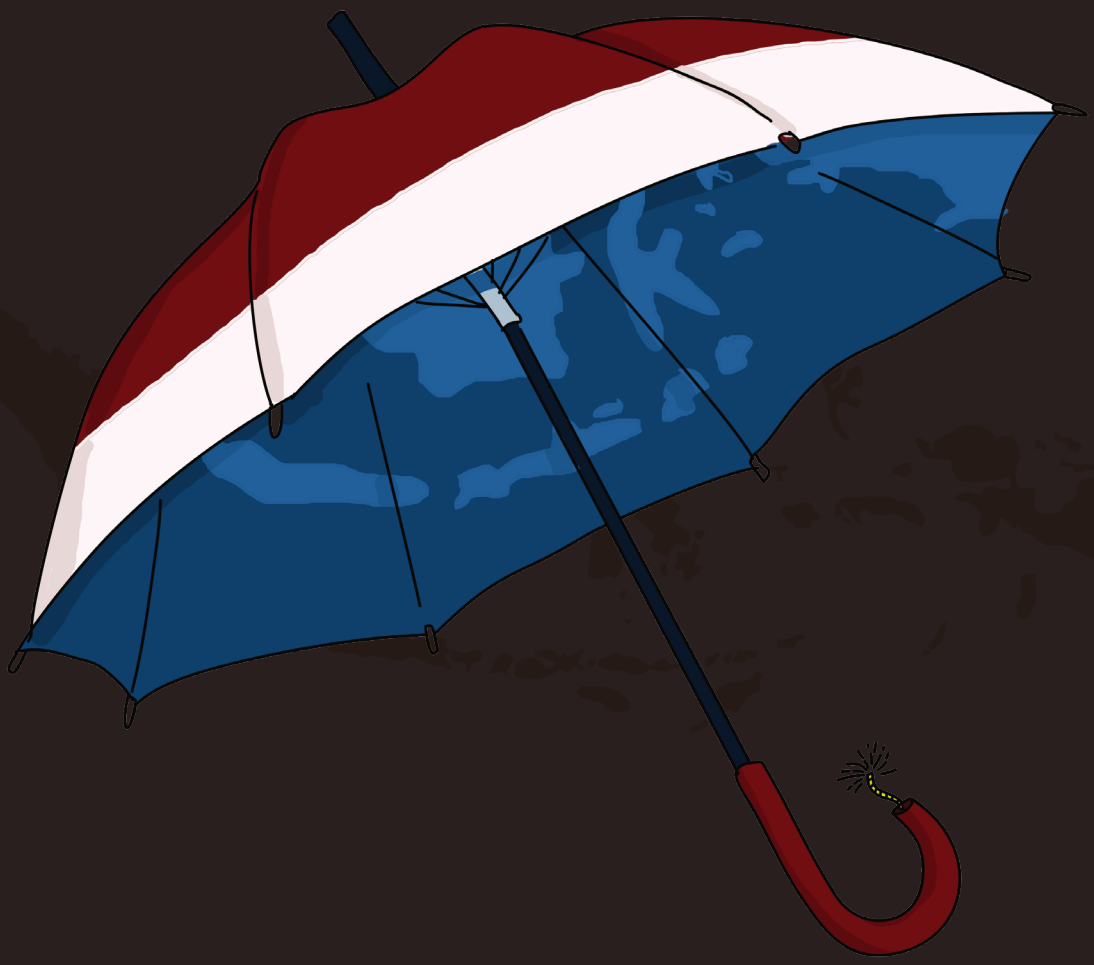

# EDITORIAL

*Monthly Update of Religious Issues* (MURI) edisi ini agak beragam topiknya. Edisi ini merekam empat topik, antara lain tentang bom bunuh diri di Bandung, keterlibatan lembaha agama dalam penanganan bencana yang menuai penolakan dari pihak-pihak tertentu, isu krusial yang termuat dalam KUHP yang ditemukan pasal-pasal dipertanyakan oleh banyak pihak, dan isu R-20 di Bali beberapa waktu lalu, baik tentang topik-topik yang dibahas maupun tentang munculnya beberapa pro-kontra tentang perhelatannya karena melibatkan pihak-pihak yang dinilai tidak segaris dengan kampanye toleransi.

Rekaman topik dalam MURI edisi ini menyajikan isu bom bunuh di Bandung yang bukan hanya memakan korban pelakunya, melaikan juga memakan korban apapat keamanan. Banyak pihak mengecam tindakan ini karena di tengah upaya bangsa menjaga kedamaian hubungan antaragama. Isu lain yang juga menarik adalah tentang munculnya beberapa pasal dan KUHP yang definisi dan isinya dianggap tidak akomodatif terhadap beragam persoalan keagamaan di Indonesia, termasuk juga pasal tentang kumpul kebo, dan lain-lain. Isu R-20 juga cukup menyita perhatian masyarakat, utamanya di media sosial. Yang dipersoalkan adalah tentang peserta yang diundang dalam acara tersebut. Salah satu peserta dalam agenda tersebut adalah pimpinan kelompok agama di India yang dianggap telah merusak hubungan antaragama di India.

Secara umum, edisi ini merangkum rekaman peristiwa yang relatif tidak menghebohkan seperti edisi-edisi sebelumnya. Satu isu yang mungkin mengkhawatirkan adalah masih adanya tindakan ekstremisme: bom bunuh diri. Tindakan tersebut, sejauh yang terekam dalam MURI tahun ini, relatif tidak pernah terjadi sebelumnya. Ini tentu saja menjadi perhatian untuk menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk menemukan cara bagaimana agar titik kesadaran berbangsa semakin meningkat. Tindakan mencederai kedamaian hidup berbangsa diharapkan semakin menurun pada tahun-tahun berikutnya.

Akhirnya, MURI edisi ini dimaksudkan sebagai ikhtiar untuk menghadirkan "rekaman" atas kejadian-kejadian atau data penting isu-isu keagamaan di Indonesia secara berkala. Tema dan berita yang dimuat dalam MURI dipilih oleh tim redaksi dengan mempertimbangkan aspek kebaruan dari dinamika keagamaan di masyarakat. Berita-berita yang dirangkum dalam MURI ini penting sebagai informasi—dan tentu bagi sebagian pembaca, berita yang termuat ini mungkin tidak baru sama sekali. Arti penting MURI ini akan terlihat dalam rentang waktu tertentu yang akan menggambarkan data longitudinal dinamika kehidupan beragama di Indonesia. Selama membaca!

BA

# AKSI BOM BUNUH DIRI DI BANDUNG DAN JARINGANNYA

### Aksi Bom Bunuh Diri Anggota Jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD)

Bom bunuh diri meledak di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung. Awal mula pelaku memasuki Mapolsek dengan membawa senjata tajam dan menerobos barisan apel polisi pada 7 Desember 2022 pukul 08.20 WIB. Setibanya di depan pintu Mapolsek, bom meledak dan pelaku tewas di tempat. Peristiwa ini mengakibatkan dua orang meninggal, salah satunya anggota polisi, Aiptu Sofyan. Selain itu, delapan anggota polisi juga mengalami luka ringan karena sedang berada di area depan Mapolsek Astana Anyar saat ledakan. Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengungkapkan hasil dari pemeriksaan sidik jari dan *face recognition* membenarkan pelaku bom bernama Agus Sudjano yang merupakan mantan narapidana terkait kasus terorisme bom panci di Cicendo pada tahun 2017. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Agus merupakan anggota kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Bandung.

**Ulasan selengkapnya**

### Jaringan Lama Beraksi Kembali

Wakil Ketua Yayasan Universitas Islam Nusantara, Obsatar, mengungkapkan pandangannya mengenai motif AS (34) pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar Bandung pada 7 Desember 2022. Menurutnya, bon bunuh diri tersebut merupakan rangkaian teror yang dilakukan menjelang Natal dan Tahun Baru. Dengan kejadian bom bunuh diri ini, Mabes Polri akan meningkatkan pengawasan seluruh markas sampai ke tingkatan yang paling bawah, sehingga rakyat tidak memberikan stigma negatif terkait kinerja kepolisian. Pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar berafiliasi dengan jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Bandung. Obsatar juga mengatakan bahwa jaringan JAD pernah melakukan aksi bom panci dan bom bunuh diri. Namun, kejadian di Polsek Astana Anyar ini belum diketahui secara jelas motif di baliknya karena target pelaku tidak terlalu masif.

**Ulasan selengkapnya**

## Radikalisme Masih Bercokol di Negeri Ini

Kejadian bom bunuh diri pada 7 Desember 2022 di Polsek Astana Anyar, Bandung, menewaskan satu anggota polisi dan melukai sepuluh orang lainnya. Agus Sujatno, Pelaku, merupakan anggota jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Bandung. Selain itu, Agus juga merupakan mantan napi terorisme yang masih berstatus Napiter Merah yang menolak mengikuti program deradikaliasi BNPT selama penahanan di Nusakambangan. Irjen Ibnu Suhaendra, Deputi II BNPT, mengungkapkan bahwa paham radikal yang dianutnya begitu kuat, sehingga pendekatan yang dilakukan ditolak oleh Agus. Pihak kepolisian juga mengatakan Agus membawa dua bom yang diletakkan di punggung dan satu lainnya di dalam tas ransel yang dikenakannnya. Bom yang dibawa pelaku merupakan bom rakitan dan berbentuk bom panci yang diisi dengan paku hingga residu TTP.

**Ulasan selengkapnya**

## Bahaya Laten Radikalisme

AS (34), pelaku bom bunuh diri di Markas Kepolisian Sektor (Mapolsek) Astana Anyar Bandung pada tanggal 7 Desember 2022 adalah mantan napiter Nusakambangan yang kini terafiliasi dengan jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Bandung. Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mengatakan pelaku pernah melakukan hal serupa yaitu pada kejadian bom di Cicendo Bandung. Akibat dari kejadian itu, pelaku sempat mendekam di jeruji besi selama empat tahun akibat perbuatannya. Kapolri juga meminta kepada seluruh jajaran kepolisian untuk bergerak dan menuntaskan kasus secara maksimal.

**Ulasan selengkapnya**

## Aksi Bom Bunuh Diri Bukanlah Ajaran Agama Islam

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengecam insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, pada 7 Desember 2022. Sulaeman Tanjung, Sekjen PBNU, mengatakan bom bunuh diri merupakan aksi sia-sia dan tidak akan mencapai tujuannya. Menurutnya, aksi ini tidak diajarkan dalam agama karena hanya menggangu ketentraman dan kerukunan masyarakat. Sebelumnya Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mengatakan pelaku terafiliasi dengan jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Dari kejadian tersebut, terdapat sebelas korban di antaranya dua meninggal dunia yaitu pelaku dan satu anggota kepolisian, dan delapan anggota kepolisian lainnya dan satu warga mengalami luka-luka. Kapolri juga mengatakan kepada jajaran kepolisian untuk menuntaskan kejadian tersebut.

**Ulasan selengkapnya**

# SENSITIVITAS ISU AGAMA DALAM PENANGANAN BENCANA ALAM

### Aksi Ormas Copot Label Gereja di Posko Gempa Cianjur Tuai Kecaman

Beredarnya video sejumlah orang yang mencopot tulisan "Tim Aksi Kasih Gereja Reformed Injili Indonesia" pada atap tenda posko bantuan bencana gempa Cianjur membuat ramai media sosial. Kapolres Cianjur AKBP, Doni Hermawan, menjelaskan bahwa tindakan tersebut diinisiasi oleh organisasi masyarakat (Ormas) Garis dari luar wilayah bencana. Pihak kepolisian Cianjur telah memeriksa ormas tersebut dan telah menegur seluruh pelaku yang terlibat. Aksi pencopotan label gereja ini mendapatkan kecaman dari berbagai pihak termasuk Bupati Cianjur, Herman Suherman, dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Ridwan Kamil juga menjelaskan bahwa Sila ke-2 Pancasila tentang Kemanusiaan yang Adil dan Beradab harus dijunjung dengan baik dan dipraktikkan dengan bijak. Bantuan kemanusiaan tidak boleh ternodai sedikit pun oleh unsur kebencian golongan.

Ulasan selengkapnya

### Gubernur Jabar Minta Polisi Tindak Ormas Pencopot Label Gereja di Tenda Bantuan Cianjur

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyesalkan aksi pencopotan label gereja di tenda bantuan korban gempa Cianjur. Menurutnya, bencana alam dapat menimpa siapa saja tanpa pilih-pilih. Demikian juga, bantuan dapat dari berbagai golongan dan kelompok tanpa melihat keyakinan atau pun agamanya. Lebih jauh lagi, Ridwan Kamil menjelaskan bahwa simbol berupa bendera, spanduk, baliho, atau pun stiker dari para pemberi merupakan hal yang wajar. Pemberi bantuan juga memiliki tanggung jawab untuk melaporkannya kepada para donatur yang menitipkan bantuan. Ridwan Kamil kemudian meminta Kapolda Jabar untuk menindaklanjuti perkara tersebut agar hal yang sama tidak terulang kembali. Kapolres Cianjur AKBP, Doni Hermawan, menjelaskan bahwa para pengungsi dan ormas tersebut tidak menolak bantuan tenda. Mereka hanya mencabut label pada tenda dengan tujuan agar netral dan bergerak atas nama kemanusiaan serta

tidak menonjolkan kelompok tertentu. Doni menegaskan bahwa masyarakat Cianjur adalah masyarakat yang toleran. Akan tetapi, aksi ormasnya yang memang jelas intoleran. Doni melanjutkan, ormas yang mencopot label gereja di tenda bantuan Cianjur adalah ormas Garis. Pemeriksaan sudah dilakukan dan pihak ormas Garis telah berjanji tidak akan mengulangi tindakan serupa.

**Ulasan selengkapnya**

### Pemerintah dan Kepolisian Mengecam Aksi Intoleran dalam Aksi Bantuan Korban Gempa Cianjur

Anggota DPR, Ono Surono, mengecam aksi intoleran pencopotan label gereja di tenda bantuan korban gempa Cianjur oleh oknum ormas intoleran dan radikal. Ono juga mendukurng Polri dan TNI untuk mengamati gerakan-gerakan dari ormas tersebut sehingga tidak terulang kembali. Para korban sangat membutuhkan bantuan dari seluruh lapisan masyarakat tanpa melihat latar belakang suku, agama, ras, dan antargolongan. Politisi PDI-Perjuangan yang menjadi Anggota Komisi IV DPR RI ini mengingatkan agar masyarakat yang ingin membantu korban gempa Cianjur tidak terpengaruh dengan tindakan yang dilakukan oknum tersebut. Dia melanjutkan bahwa gempa Cianjur cukup membawa kesengsaraan untuk rakyat karena banyaknya korban yang meninggal dunia, luka-luka, dan mengungsi karena kondisi rumahnya yang rusak parah. Proses pemulihan kondisi-kondisi ini memerlukan waktu cukup lama. Oleh karena itu, kerja sama dari seluruh warga Jawa Barat bahkan dari seluruh Indonesia sangat diperlukan. Sebelumnya, Kapolda Jawa Barat, Irjen Suntana, memastikan akan memproses hukum pelaku pencopotan label gereja di posko bantuan gempa Cianjur. Suntana menyesalkan tindakan main hakim sendiri serta memberikan *framming* isu keagamaan di saat Cianjur tengah membutuhkan banyak bantuan usai rentetan gempa yang menerpa. Setelah melakukan penyelidikan, dia memastikan bahwa pihaknya tidak akan pandang bulu dalam menangani kasus ini sama seperti kasus penghadangan bantuan logistik yang juga ramai beberapa hari sebelumnya.

**Ulasan selengkapnya**

### Klarifikasi Dokter yang Ditolak sebagai Relawan Gempa Cianjur

Yoanne Immanuella ramai diperbincangkan di sosial media setelah pernyataan dirinya yang mengaku sebagai seorang dokter Internist yang siap menjadi relawan untuk membantu korban gempa di Cianjur dan ditolak karena beragama Katolik. Dia memaparkan rentetan kejadian yang dialaminya melalui akun Twitter pribadinya. Dia menjelaskan bahwa di lokasi kejadian

terdapat masyarakat yang menanyakan soal agamanya, dan karena pengakuannya sebagai penganut agama Katolik, dirinya dicap "haram". Pernyataan ini disampaikan Yoan pada kolom komentar unggahan video aksi pencabutan label gereja di tenda bantuan gempa Cianjur. Setelah dilakukan penulusuran oleh media guna memastikan kebenaran pernyataan Yoan dari berbagai sumber, diketahui bahwa akun tersebut adalah akun palsu. Sebuah akun Instagram @yoanbelle yang merasa namanya digunakan dalam cuitan Twitter tersebut memberikan klarifikasi bahwa dirinya bukanlah dokter Internist melainkan dokter Gigi spesialis Prostodonsia. Dia menjelaskan bahwa dirinya sudah pernah menindak akun palsu yang mengatasnamakan dirinya, tetapi kejadian tersebut terulang lagi Setelah ramai dibicarakan, akun Twitter yang memberikan pernyataan palsu itu sudah tidak dapat diakses.

**Ulasan selengkapnya**

### Polda Jabar Bantah Isu Seorang Dokter Non-Muslim Ditolak di Cianjur

Kabid Humas Polda Jabar menyatakan bahwa kabar terkait penolakan seorang dokter dalam penanganan bencana gempa Cianjur adalah hoaks. Dalam unggahan *Instagram* @jabarsaberhoaks menjelaskan bahwa kabar tersebut merupakan berita bohong dan berasal dari akun palsu. Selanjutnya, dokter Yoanne Immanuella juga telah memberikan konfirmasi melalui akun *Instagramnya* @yoanbelle bahwa namanya telah dicatut oleh akun *twitter* tersebut. Selain itu, dirinya juga bukan merupakan dokter Internalist melainkan dokter Gigi spesialis Prostodonsia. Pengecekan juga dilakukan Polda Jabar melalui website *kki.go.id* yang menyatakan bahwa nama Yoanne Imanuella terdaftar sebagai Dokter Gigi spesialis Prostodonsia lulusan Universitas Gadjah Mada, sehingga pernyataan seseorang di *twitter* yang mengaku sebagai dokter yang ditugaskan sebagai relawan medis gempa Cianjur dengan nama Yoanne Imanuella adalah salah. Lebih lanjut lagi, Kabid Humas Polda Jabar menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pendalaman terkait berita tersebut. Apabila terdapat tindak pidana yang ditemukan maka akan diproses hukum. Begitu pula dengan medsos dan akun yang mengandung unsur pidana juga akan diproses sesuai hukum.

**Ulasan selengkapnya**

# KERJA SAMA LEMBAGA-LEMBAGA AGAMA DALAM PENANGANAN KORBAN BENCANA

### DWP Kemenag Donasi 100 Juta Lebih untuk Korban Cianjur

Bantuan uang tunai senilai Rp. 119.840.000,- diserahkan oleh Eny Retno Yaqut, Penasehat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI), kepada Tim Kemenag Peduli Bencana dalam acara yang berlangsung di halaman Kantor Pusat Kemenag RI. Bantuan tersebut kemudian dijadikan satu dengan bantuan dari para ASN Kemenag RI hingga mencapai jumlah Rp. 34.764.840.000,- untuk korban gempa Cianjur. Secara simbolis, bantuan tersebut diserahkan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jabar, Ajam Mustajam, dan didampingi oleh Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Cianjur, Ramlan Rustandi.

Ulasan selengkapnya

### Kemenag Siapkan Bantuan dan Layanan Trauma Healing Bagi Korban Gempa Cianjur

Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama akan menyiapkan bantuan untuk perbaikan Kantor Urusan Agama dan rumah ibadah yang rusak akibat gempa Cianjur. Setelah dilakukan peninjauan oleh Plt. Sekretaris Ditjen Bimas Kemenag, M. Adib, di lokasi gempa sehari setelahnya, terdapat 21 masjid dan lima gedung KUA yang rusak. Selain bantuan sarana dan prasarana, Kemenag juga merencanakan para penghulu dan penyuluh agama Islam untuk memfasilitasi layanan *trauma healing* bagi penyintas. Tim layanan *trauma healing* ini akan diberi pembekalan. Menurutnya, penyintas juga membutuhkan motivasi agar tetap semangat melanjutkan hidup dan pendampingan agar tidak terlalu terpuruk. Lebih lanjut lagi, Kemenag juga memberikan layanan pemulasaraan jenazah.

Ulasan selengkapnya

### Geliat Gereja di Tengah Bencana

Pdt. Jacky Manuputty dalam laman *website* PGI membagikan cerita pribadinya ketika mengunjungi wilayah yang terdampak gempa Cianjur untuk melihat kerja sama jaringan gereja dan lembaga-lembaga Kristen dalam

menangani bencana gempa Cianjur. PGI memiliki Pos Terpadu PGI yang berpusat di gedung gereja GKP Cianjur. Pdt. Jacky menjelaskan pertemuannya dengan relawan lintasgereja yang dikoordinir oleh PGIS Cianjur. Pos Terpadu diinisiasi oleh Biro PRB PGI dengan Jakomkris, PGIS Cianjur dan beberapa lembaga Kristen lainnya berupaya memperkuat koordinasi lintasgereja dan lembaga Kristen dalam hal penanganan bencana. Ia juga menceritakan kunjungannya ke beberapa wilayah terdampak yang seolah justru menjadi bantahan dari isu penolakan bantuan karena berbeda agama yang ramai di media sosial. Dalam obrolannya bersama relawan lintasgereja di Pos Terpadu, tidak terdengar sedikit pun cerita tentang penolakan warga. Para warga terdampak justru berantusias bekerja sama dengan relawan Jakomris dan gereja-gereja lokal di sana tanpa mempertanyakan asal-usul lembaga bantuan atau pun latar belakang agama sebagaimana yang ramai diisukan di media sosial. Relawan jaringan dan lembaga Kristen juga membentuk kerja sama lintasiman dengan beberapa organisasi Islam, seperti LPBI-NU PCNU dari Jawa Barat maupun dari Kab. Cianjur sendiri. Selain itu, relawan dari Gerakan Kemanusiaan Indonesia (GKI) juga membangun Pos Penanggulangan di gedung gereja GKI Cianjur dan bekerja sama dengan relawan Gusdurian, GP Ansor, dan lainnya. Menurut Pdt. Jacky, kerja kemanusiaan semacam ini dapat menjadi simpul penguatan relasi antaragama mengingat bencana tidak memiliki identitas agama.

**Ulasan selengkapnya**

# PASAL-PASAL BERMASALAH DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

### Pasal KUHP Baru Mengancam Demokrasi

Dalam rapat paripurna, Selasa, 6 Desember lalu, pemerintah dan DPR menyetujui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Padahal, publik—termasuk para aktivis, akademisi, dan jurnalis—menilai RUU KUHP masih memuat ketentuan-ketentuan yang dianggap bermasalah karena dapat mengarah pada masyarakat yang terkriminalisasi serta membahayakan demokrasi dan kebebasan pers. Hukum pidana masih dianggap sebagai warisan kolonial dan dapat digunakan sebagai sarana kriminalisasi. Perhimpunan Masyarakat terus mengulang dan mengorganisir demonstrasi menentang hukum pidana.

**Ulasan selengkapnya**

### RKUHP Disahkan, Terdapat 12 Aturan yang Bermasalah

DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi undang-undang melalui Rapat Paripurna di Gedung DPR Senayan pada Selasa, 6 Desember 2022. Secara garis besar menurut koalisi masyarakat sipil ada 12 aturan yang bermasalah dalam draf RKUHP terbaru, yakni pasal terkait *living law* atau hukum yang hidup di masyarakat, pasal soal hukuman mati, larangan penyebaran paham yang tidak sesuai Pancasila, penghinaan terhadap pemerintah dan Lembaga negara, *contempt of court* atau penghormatan pada badan peradilan, kohabitasi atau hidup bersama di luar perkawinan, ketentuan tumpeng-tindih dalam Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), larangan unjuk rasa, aturan pelanggaran HAM berat, pasal soal kohabilitasi, meringankan ancaman bagi koruptor, dan korporasi sulit dihukum.

**Ulasan selengkapnya**

### Pasal tentang Meninggalkan Agama Bertentangan dengan Standar HAM Internasional

Menurut Andreas Harsono dari Human Rights Watch, UU KUHP melanggar sejumlah standar hukum HAM internasional yang telah diratifikasi parlemen Indonesia. Indonesia sendiri telah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) pada tahun 2005, tetapi dalam KUHP masih terdapat pasal terkait penodaan agama. Menurut ICCPR, negara-negara yang telah meratifikasi ICCPR diwajibkan untuk mulai menghapus pasal-pasal yang menyangkut penodaan agama. Andreas melanjutkan, alih-alih menghapusnya, Indonesia menambahkan satu pasal tentang penodaan agama, sehingga jumlah pasal tentang hal itu menjadi enam. Selain itu, menurutnya tidak ada bangsa di dunia yang mengadopsi pasal baru KUHP tentang seseorang yang meninggalkan agama.

**Ulasan selengkapnya**

### KUHP Baru Hapus Frasa "Penodaan Agama", Diganti Poin-poin Ini

DPR mengesahkan RKUHP, dan akan berlaku sampai tahun 2025. Frasa "penodaan agama" yang terdapat di KUHP sebelumnya, pada pengesahan KUHP yang baru frasa tersebut tidak lagi ditemukan. Istilah "penyalahgunaan atau penodaan agama" diubah dan dihapus dari KUHP yang baru. Lebih lanjut, ketiga jenis perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap agama yang dilarang oleh KUHP baru ini diatur dalam Bab VII yang berjudul "Tindak Pidana Terhadap Agama, Kepercayaan, dan Kehidupan atau Kepercayaan Beragama".

**Ulasan selengkapnya**

### Ketua YLBHI Tanggapi Pasal-Pasal Bermasalah

Muhammad Isnur, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), melihat bahwa ada beberapa pasal dalam RKUHP yang bermasalah, terutama kebebasan berpendapat. Dalah satunya *living law* yang dianggap meresahkan masyarakat adat karena berpotensi akan mengurusi urusan mereka. Begitu juga dengan pasal tentang penghinaan presiden yang jika diterapkan dapat menimbulkan kekacauan di masyarakat. Berikutnya tentang pasal larangan penyebaran ideologi lain selain Pancasila, dia menyoroti penerapan undang-undang ini tidak sesuai karena berpotensi menjerat banyak pihak, seperti masyarakat yang memiliki paham khilafah, syariah, dan lain sebagainya. Selain itu, dia juga turut memberi komentar terkait pasal 256 yang berisi ancaman bagi pihak penyelenggara demokrasi tanpa pemberitahuan seperti demonstrasi yang dilakukan oleh ojek *online* (ojol).

**Ulasan selengkapnya**

## AJI Garisbawahi Pentingnya Hak Asasi Manusia dalam Menyuarakan Pendapat

Ada sekitar 17 pasal yang disoroti dan dianggap bermasalah oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dalam draf RKUHP versi 30 November 2022 dan direncanakan disahkan pada Selasa, 6 Desember 2022. Sebagai upaya penolakan AJI mulai menggelar aksi secara *luring* dan *daring* di berbagai kota pada tanggal 4-5 Desember 2022. Sasmito, anggota AJI, mengatakan kekecewaannya karena pembahasan RKUHP tidak transparan dan tidak mengajak publik untuk berpartisipasi. Sementara anggota dewan pers, Ninik Rahayu, menambahkan bahwa pengesahan RKUHP merupakan ancaman bagi pers karena banyaknya pasal yang bermasalah. Lebih lanjut, dia menegaskan pentingnya menghargai hak asasi manusia dengan cara memerdekakan orang-orang dalam menyampaikan pendapatnya.

**Ulasan selengkapnya**

## Pidana Perzinahan dalam RKUHP Terbaru

Dalam RKUHP terbaru yang belum lama ini disahkan, kumpul kebo atau tinggal serumah tanpa ikatan pernikahan menjadi delik pidana sepanjang ada aduan menurut draf RKUHP 30 November 2022 yang dikirimkan juru bicara RKUHP, Albert Aries, pada Minggu, 12/4/2022. Dalam pertimbangannya, historisitas KUHP turut menjadi faktor dimasukkannya pasal tersebut, di mana KUHP sendiri merupakan sisa peninggalan Belanda. Masyarakat Belanda tidak mempermasalahkan kumpul kebo. Hal tersebut dianggap tidak mencerminkan norma Timur, sehingga zina dimasukkan delik pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu tahun).

**Ulasan selengkapnya**

## KUHP Baru Berikan Jaminan Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan Lebih Baik

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Rumadi, membantah komentar bahwa KUHP baru dapat mengancam kebebasan beragama atau berkeyakinan. Ia menegaskan bahwa delik keagamaan diarahkan pada perbuatan yang bersifat permusuhan, kebencian, menghasut untuk melakukan kekerasan, serta mendiskriminasi terhadap agama, kepercayaan orang lain, golongan atau kelompok atas dasar agama dan kepercayaannya. Ia menambahkan, KUHP baru memberikan perlindungan yang jelas bagi kelompok minoritas, khususnya penghayat kepercayaan, yang tidak ada dalam KUHP sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari judul Bab VII KUHP baru yang terdiri dari enam pasal (pasal 300–305) berjudul Kejahatan terhadap Agama, Keyakinan, dan Kehidupan Keagamaan atau Keyakinan.

**Ulasan selengkapnya**

# PRO-KONTRA R20

### Keterlibatan NU dalam R20

Forum R20 (Religion of Twenty) yang dihadiri oleh berbagai tokoh agama, memperoleh apresiasi dari Prof KH Said Aqil Siradj, Dewan Pembina Islam Nusantara Foundation (INF). Forum R20 diadakan pada 2-3 November 2022. Secara khusus, kiai Said mendukung keterlibatan NU yang berdasar pada sikap *wasathiyah*, yakni cara berpikir yang tidak meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah yang menghasilkan fatwa-fatwa yang moderat. Adapun R20 merupakan rangkaian kegiatan untuk menyambut satu abad NU yang berpuncak di Februari 2023. Sedangkan R20 tahun depan akan diadakan di India sebagai tuan rumahnya.

Ulasan selengkapnya

### R20 sebagai Pembangunan Ruhani

Menanggapi forum R20 yang akan berlangsung di Nusa Dua, Gubernur Bali, I Wayan Koster, menegaskan pentingnya pertemuan tersebut. Unsur spiritual yang terdapat dalam forum R20 seirama dan sejalan dengan ketiga materi yang telah dipersiapkan oleh Presiden dalam G20. Pembangunan yang yang dicangkan oleh Presiden yang berkaitan dengan kesehatan global, kecepatan teknologi digital, dan transisi energi bersih merupakan pembangunan yang bersifat duniawi. Menurutnya, R20 yang mencanangkan pembangunan berupa toleransi, kerukunan, kedamaian, kemanusiaan, persatuan, dan kesatuan, bermakna secara niskala. Oleh karena itu, R20 merupakan segi pembangunan rohani dan spiritual sehingga melengkapi G20.

Ulasan selengkapnya

### Mahfud MD: Jangan Jadi Politik Identitas

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, beranggapan bahwa forum R20 dapat menjadi sarana untuk mencapai persatuan yang berintikan kemanusiaan di tengah perbedaan agama dan keyakinan. Menurutnya, perbedaan tidak boleh menghalangi manusia untuk membangun kemajuan bersama. Oleh karena itu, R20 dapat menjadi sarana bagi bangsa Indonesia yang masih bersikap eksklusif dalam kehidupan beragama, sehingga mengancam rasa persatuan. Sikap eksklusif yang meresap ke dalam politik menimbulkan kecenderungan untuk berpolitik identitas. Politik identitas dapat merusak kesatuan dan kemanusiaan. Politik identitas merupakan bentuk dari hegemoni dan diskriminasi

yang menjauhkan kesepakatan bersama dari semangat persatuan.

**Ulasan selengkapnya**

### Hasil R20 Diharapkan Tak Hanya Gagasan, tapi Gerakan

Halili Hasan, Direktur Riset Setara Institute, mewanti-wanti agar hasil dari R20 tidak hanya merupakan gagasan, tetapi perlu mewujud dalam perubahan sosial dalam masyarakat. Para tokoh yang hadir dalam forum R20 memiliki legitimasi untuk mengarahkan pengikut dan anggota organisasinya dalam proyek-proyek perdamaian. Perbedaan agama telah mengakibatkan segregasi dalam tingkat sosial, sehingga penguatan akan aspek kemanusiaan perlu dilakukan dalam tindakan nyata. Menurut Halili, Indonesia sebagai tuan rumah R20 perlu untuk mewujudkan gagasan R20, salah satunya ialah dengan menurunkan tingkat kejahatan kemanusiaan yang berdasarkan keyakinan karena tiap tahun kurang lebih terdapat 100 kasus kejahatan berbasis perbedaan keyakinan.

**Ulasan selengkapnya**

### Pemuda sebagai Pelopor Dialog Agama menjadi Perhatian R20

Wibowo Prasetyo, Staf Khusus Menteri Agama bidang Media dan Komunikasi, mengajak pemuda-pemudi Indonesia untuk mengedepankan kebesaran hati dan ikhlas dalam menanggapi keberagaman dan perbedaan di Indoneisa. Tak hanya itu, kebersamaan dan toleransi diusahakan untuk menjamin dan mengusahakan perdamaian dunia. Menurutnya, forum R20 yang telah menghasilkan 11 komunike untuk mendorong sebuah percapakan/dialog yang jujur dan realistis guna menjamin agama sebagai solusi yang asli dan dinamis, bukan sebagai masalah. Terlebih, R20 yang secara aktif mendukung pembangunan manusia merupakan gerakan global yang mengarah pada keharmonisan dan kedamaian.

**Ulasan selengkapnya**

### R20 Hadirkan Kelompok Radikal Hindu, Ini tanggapan Kiai Muhyiddin

Kehadiran Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) dalam R20 memperoleh penolakan dari Ketua Dewan Pembina Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI), KH Muhyiddin Junaid. RSS yang merupakan kelompok ekstremis Hindu yang dinilai bertentangan dan kontradiktif dengan tujuan utama serta merusak nama baik Indonesia sebagai ketua G20. Menurut Kiai Muhyiddin, RSS memiliki kesamaan dengan kelompok radikal dan terorisme ISIS yang dapat mengakibatkan kerusakan secara global. Baginya, Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia harus menjadi garda terdepan dalam mempromosikan Islam *wasathiyah* di dunia.

**Ulasan selengkapnya**

# TOPIK-TOPIK SEPUTAR R20

## Empat Topik R20

Kepedihan sejarah (*historical grievances*) menjadi salah satu topik bahasan dalam forum R20. Topik ini membicarakan tentang pengungkapan kebenaran, rekonsiliasi dan pengampunan yang penting untuk mengatasi luka-luka sejarah yang ada. Selain itu, topik yang dibahas dalam forum tersebut ialah "mengidentifikasi dan merangkul nilai-nilai mulia yang bersumber dari agama dan peradaban besar dunia", "rekontekstualisasi ajaran agama yang usang dan bermasalah", "mengidentifikasi nilai-nilai yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan menjamin koeksistensi damai", dan "ekologi spiritual". Topik-topik tersebut diharapkan dapat menjadi suatu pernyataan resmi bersama dari para pemimpin agama yang hadir dalam forum internasional tersebut.

**Ulasan selengkapnya**

## Kerja Sama Antartokoh Agama

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga memberikan sambutan dalam forum R20. Jokowi mengutarakan bahwa para tokoh dunia dari berbagai agama perlu untuk bekerja sama agar kontribusi agama dalam penyelesaian masalah-masalah global meningkat. Persaingan dan perang perlu dihentikan demi dunia yang damai, bersatu, dan bekerja sama untuk mewariskan kebaikan bagi generasi mendatang. Presiden Jokowi juga menyampaikan kemajemukan Indonesia dalam hal suku, bahasa, dan agama yang dapat dipersatukan oleh Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

**Ulasan selengkapnya**

## Agama Diharapkan menjadi Bagian dari Solusi di Timur Tengah

Forum R20 yang diadakan di Nusa Dua, Bali, dihadiri oleh ratusan partisipan dari mancanegara. Salah satunya adalah

Rabbi Yakov Nagen, direktur *Beit Midrash for Judaism and Humanity*, yang juga menghadiri forum tersebut. Rabbi Yakov menyatakan harapannya agar dalam permasalahan di Timur Tengah, agama juga dapat menjadi bagian dari solusi. Ia menilai R20 menjadi forum penting untuk menjembatani beragam sudut pandang keagamaan dari berbagai belahan dunia. "Bagi orang-orang di Timur Tengah yang telah sangat menderita, kita membutuhkan agama untuk menyatukan kita," ungkap Rabbi Yakov.

**Ulasan selengkapnya**

## Identitas bukan Senjata

Menurut Gus Yahya, degradasi lingkungan, bencana alam, kemiskinan, pengangguran, ketelantaran, ekstremisme dan terorisme menjadi keresahan para pemimpin agama dalam R20. Sehubungan dengan itu, pada penutupan R20, aliansi global dalam forum R20 menyatakan komitmen untuk mendorong pencegahan digunakannya politik identitas sebagai respons pada krisis global yang sedang berlangsung. Lebih lanjut, ditegaskan juga komitmen untuk menekan penyebaran kebencian antarkomunitas dengan menyerukan semangat solidaritas dan saling menghargai antarkelompok dengan latar belakang, budaya, serta kebangsaan yang berbeda.

**Ulasan selengkapnya**

UNIVERSITAS GADJAH MADA
SEKOLAH PASCASARJANA
PROGRAM STUDI AGAMA
DAN LINTAS BUDAYA

**MONTHLY UPDATE ON RELIGIOUS ISSUES IN INDONESIA | JANUARI 2022**

**Pemimpin Redaksi:** M. Iqbal Ahnaf | **Redaktur Pelaksana:** Budi Asyhari, Ell Dyah Praptanti | **Redaktur Artistik:** M Rizal Abdi | **Tim Redaksi:** M. Iqbal Ahnaf, Budi Asyhari, M Rizal Abdi, Rabiatul Adawiah, Intan Novelia, Nadila Ika Arifianti, Musdodi Manalu, Rezza Prasetyo Setiawan, Muhammad Syihabuddin Annur, Yohanes Babtista Lemuel Christandi